

**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2022**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)



Oleh :

SRI KUNTUM KHAIRANA

2021/21133085

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

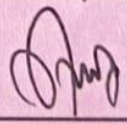
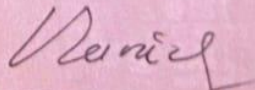
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2018-2022

Nama : Sri Kuntum Khairana
NIM/ TM : 21133085 / 2021
Program Studi : D III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D III) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 15 Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Mia Angelina Setiawan, S.E., M.Si	(Ketua)	
Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	(Anggota)	
Vanica Serly, S.E.,M.Si	(Anggota)	

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018-2022**

Nama : Sri Kuntum Khairana
NIM : 21133085
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D III) Akuntansi

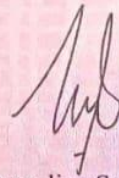


Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc
NIP. 198401132009122005

Padang, Juli 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Mia Angelina Setiawan, S.E., M.Si
NIP. 198805072014042001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sri Kuntum Khairana
NIM	: 21133085
Tempat/Tanggal Lahir	: Talang Babungo, 13 April 2003
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Alamat	: Jorong Talang Timur Talang Babungo, Kec. Hiliran Gumanti, Kab. Solok
Judul Tugas Akhir	: Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini , serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 5 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Sri Kuntum Khairana

ABSTRAK

Sri Kuntum Khairana : Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018 – 2022

Pembimbing : Mia Angelina Setiawan, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat derajat Desentralisasi dan Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018 – 2022 terdapat permasalahan yaitu penerimaan pendapatan transfer yang masih tinggi dan pendapatan asli daerah belum tergarap secara maksimal di berbagai sektor.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2022 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl Khatib Sulaiman No 43 Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tinjau dari : 1) Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah dari tahun 2018 – 2022 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 38,51% dengan kriteria penilaian cukup 2) Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018 - 2022 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 64,80% dengan kriteria penilaian sedang dan pola hubungan yang terjadi partisipatif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, Rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul **“Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022”** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakul-kharimah bagi seluruh muslim seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Sumijan, Ibunda Ismi Yusmita, kakak pertama Bunga Suci Lestari, kakak kedua Intan Permana, dan adik penulis Mutiara Fuji Lestari yang telah memberikan kesungguhan do'a bantuan morl maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Mayar Afrienyenti, SE,.M.Sc Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Mia Angelina Setiawan, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan arahan selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Terimakasih untuk Kak Lora Santika, dan Kak Nadya Meylisa Zahra sahabat seperjuangan dalam menyusun Tugas Akhir yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bantuan serta selalu setia dan ada selama dua tahun belakangan hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.
7. Untuk semua member BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Jeon Jungkook, terutama Kim Taehyung dan Park Jimin yang sudah membantu penulis melawan Pannic Attack dan Anxiety selama pembuatan Tugas Akhir serta memberikan motivasi lewat karya-karya nya hingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2021 yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis.

9. Terakhir untuk diri penulis sendiri, terimakasih banyak sudah bertahan sejauh ini, telah bekerja keras walau dalam keadaan yang tidak baik, aku bangga pada diri ku sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihanku.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan di ridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih

Padang, 03 Agustus 2024

Sri Kuntum Khairana

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Otonomi Daerah	10
B. Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
1. Keuangan Daerah.....	11
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
3. Laporan Keuangan Daerah.....	14
4. Kinerja Keuangan	24
5. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	25
C. Standar Akuntansi Pemerintah.....	27
D. Analisis Kinerja Keuangan	30
E. Desentralisasi.....	31

F. Kemandirian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1. Lokasi Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian.....	35
C. Rancangan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Tahap Penelitian.....	36
3. Objek Penelitian.....	37
4. Sumber Data Penelitian.....	37
5. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum	39
B. Pembahasan.....	41
1. Analisis Derajat Desentralisasi	41
2. Analisis Kemandirian.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi.....	32
Tabel 2.2 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	34
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi.....	41
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Lampiran 6 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, memulai proses Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang diikuti oleh kebijakan-kebijakan lainnya yang turut mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diharapkan agar daerah mampu mengembangkan diri sehingga tercipta suatu pola kemandirian daerah yang selain memajukan daerah itu sendiri sekaligus mampu mensejahterakan masyarakatnya

Dalam Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran.

Kebijakan Desentralisasi bertujuan agar daerah mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Mengingat pelaksanaan

program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya yang sangat besar, maka daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi untuk membangun kemandirian daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak akan bisa melaksanakan fungsi nya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan PAD harus menjadi bagian yang tersebar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan daerah demi mewujudkan tingkat kemampuan dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian, daerah harus berupaya terus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan sumber pajak atau retribusi daerah.

Mengingat masih beragamnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menjalankan otonominya, maka salah satu kriteria yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melihat secara nyata kemampuan daerahnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dapat diukur melalui kinerja keuangan.

Menurut Sumarjo (2010), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan telah digunakan secara luas dan diterapkan dalam mengukur kinerja daerah tersebut. Salah satu analisis rasio laporan keuangan yang dapat mengukur kinerja kemampuan keuangan suatu daerah adalah dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Menurut Fitra (2019), derajat desentralisasi digunakan untuk melihat dan menggambarkan seberapa besar campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang memperlihatkan tingkat kesiapan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentralisasi memperlihatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, sehingga semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin baik.

Rasio derajat desentralisasi ini dilihat melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah.

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah dengan sumber pendapatan eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Fitra, 2019).

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian Tengah dengan luas 42.012,89 km². Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Banyaknya potensi lokal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia menjadi modal bagi Sumatera Barat untuk menciptakan daerah yang mandiri. Potensi lokal dan sumber daya ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu berkontribusi lebih

terhadap daerah dibandingkan dari pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik sehingga kemandirian suatu daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat dapat di lihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin kecil Pendapatan Asli daerah maka semakin ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. Berikut ini tabel pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 :

Tabel 1.1
Total Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain pendapatan yang sah
2018	6.464.256.196.560	2.343.568.641.600	4.103.908.324.960	16.779.230.000
2019	6.607.003.065.736	2.375.930.636.830	4.203.393.039.900	45.998.837.000
2020	6.421.814.751.636	2.174.615.145.097	4.180.057.722.354	67.141.884.185
2021	6.652.314.574.092	2.409.508.994.798	4.089.410.456.700	93.395.222.594
2022	6.175.628.018.183	2.821.838.323.784	3.275.683.343.529	78.106.351.140

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah pada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan pada tiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan, dan di tahun 2020 hingga 2022 terjadi kenaikan yang sangat drastis. Begitupun dengan pendapatan transfer pada Provinsi Sumatera

Barat, dimana terjadi kenaikan di tahun 2018 ke tahun 2019 dan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022.

Dari data pendapatan pemerintah provinsi Sumatera Barat diatas kita hanya dapat melihat kondisi dan keadaan keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan angka rupiah saja. Dimana terlihat peningkatan dan penurunan pendapatan setiap tahun nya berdasarkan angka yang tertera di laporan keuangan. Namun jika hanya melihat dan berpatokan pada angka yang tertera di laporan keuangan saja maka kita belum dapat melihat bagaimana kinerja suatu pemerintah daerah salah satunya kinerja berdasarkan tingkat desentralisasi dan rasio kemandirian.

Pengukuran kinerja keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi dan kemandirian sangatlah penting dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya.

Adanya peningkatan PAD belum dapat membuktikan bahwa provinsi Sumatera Barat telah mandiri dalam hal keuangan, karena jika di lihat dari pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat, terlihat bahwa jumlah pendapatan transfer atau dana yang di transfer dari pusat kepada pemerintah daerah masih sangat tinggi dibanding dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu pengukuran kinerja keuangan daerah juga dilihat berdasarkan persentase

perbandingan yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah yang di sebut dengan rasio derajat desentralisasi dan perbandingan antara sumber pendapatan internal dan sumber pendapatan eksternal yang disebut dengan rasio kemandirian. Dengan dilakukannya perbandingan tersebut, maka akan dapat dilihat kinerja keuangan Daerah/Provinsi. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat desentralisasi dan kemandirian yang tinggi, apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu membiayai kegiatan nya sendiri. Oleh karena ini penulis merasa perlu dilakukannya analisis derajat desentralisasi dan kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Barat berdasarkan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang: **“Analisis Derajat desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah nya yaitu :

1. Bagaimana tingkat derajat desentralisasi keuangan provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2022?

2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis derajat desentralisasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis rasio kemandirian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kinerja keuangan daerah khusus nya pada tingkat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan untuk menambah wawasan tentang kinerja keuangan daerah provinsi Sumatera Barat khususnya desentralisasi

dan kemandirian keuangan daerah yang dapat dijadikan referensi bagi penulis berikutnya yang membahas topik yang sama.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai hasil dan tujuam dalam pemerintahan nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun walau dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,28%, kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 1% dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dengan kisaran 2,62% - 8,47%. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 38,51% ini berarti kemampuan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sudah berada dalam kategori cukup.
2. Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan rasio kemandirian mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun walau dalam jumlah yang tidak begitu besar yaitu kisaran 0,69% - 25,67% dengan rata-rata tingkat kemandirian selama lima tahun 64,60% berada dalam

skala interval 50% - 75% dengan pola hubungan Partisipatif. Artinya peranan pemerintah pusat sudah semakin berkurang, mengingat pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi daerah nya. Ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus ketergantungan terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan yang lain agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan daerah serta mengelola sumber pendapatan yang ada, agar target pendapatan dapat terealisasi dengan baik, sehingga tidak mengandalkan dana dari sumber eksternal yaitu pemerintah pusat yang membuat tingkat ketergantungan semakin tinggi dan tingkat kemandirian semakin rendah.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempertahankan kemandirian nya untuk periode-periode selanjutnya dan diharap agar

tingkat kemandirian dan desentralisasi bisa dapat meningkat untuk periode-periode yang akan datang.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera barat diharapkan agar lebih serius dalam mengoptimalkan PAD yang di himpun dari berbagai sektor terutama sektor pajak dan retribusi daerah dan lebih serius dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan tempat penelitian dan waktu penelitian serta menggunakan dengan alat pengukuran atau rasio keuangan lainnya sebagai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, L.A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Sulawesi. AA-DZ Grafika
- Arodhiskara, Yadi, dkk. (2023). *AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pendekatan Berbasis Akrua*. Purbalingga. EUREKA MEDIA AKSARA
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019): 149-163.
- Fitra, Halkadri. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang. CV IRDH.
- Halim, A. dan Kusufi, M. S. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan – Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono, dkk. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung : Media Sains Indonesia.
<https://ppid.sumbarprov.go.id/> (Akses 29 Mei 2024)
- Karmeli, E., Haryadi, W., & Muslimin, M. (2022). Analisis Kemandirian Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 52-60.
- Oki, Kamilaus Konstanse, Frederic W. Nalle, and Pricilia AV Meomanu. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu." *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2.2 (2020): 1-6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Sejarah Sumatera Barat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat)), diakses pada tanggal 12 juli 2024

- Sari, Imelda, Masagus Asaari, and Ika Sefty Nurul Hidayah. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019." *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* . Bandung : Alfabeta
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98-114.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21.
- Umasangadji, A., Bakri Soamole, S. E., & Samiun, M. Z. M. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEPA)*, 13(2).
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.